

Accepted: Mei 2021	Revised: Juni 2021	Published: Juni 2021
------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Plus Al Hikmah Kediri

Lia Roikhanatus Sa'adah dan M. Hanif Satria Budi

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email : budisatria1992@gmail.com

Abstract

Can't be denied that implementation of a learning program's in the school institution about problem of financing or funding is an important thing. Because funding have an effect to the smoothness and achievement of a programs. The processing of implementation learning in a school institution will work effectively if supported by good financing. But not only that, an existing financial management must be good and clear so that the funds can be used to the maximum. Beside that, supervision of financial management needs to be done to minimize errors that may occur. The aims of this research is to find out about management of financing in the Al Hikmah Emelentary School especially about source of funds and financial accountability. The methode used in this research is Research, documenter and interview with the people who involved. From the result of data, an overviews about management financing system. Management of financing in the Al Hikmah elementary school Kediri is professional and effective. About the funding needed for the school activity is sufficient. Beside that, all about funding that received by elementary school of Al Hikmah and financial accountability is always reported to the people or institution that involved. And also all the funding can be used for the needs of school activities.

Keywords: *financing; funding; management of financing*

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program pembelajaran di lembaga sekolah tentang masalah pembiayaan atau pendanaan merupakan hal yang penting. Karena pendanaan berpengaruh terhadap kelancaran dan pencapaian suatu program. Pengolahan pelaksanaan pembelajaran di lembaga sekolah akan bekerja efektif jika didukung dengan pembiayaan yang baik. Namun tidak hanya itu, pengelolaan keuangan yang ada harus baik dan jelas agar dana tersebut dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, pengawasan manajemen keuangan perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan di Sekolah Emelentary Al Hikmah terutama tentang sumber dana dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian, documenter dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Dari hasil data, ikhtisar tentang sistem pembiayaan manajemen. Pengelolaan pembiayaan di SD Al Hikmah Kediri profesional dan efektif. Soal dana yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah sudah cukup. Selain itu, semua tentang dana yang diterima oleh SD Al Hikmah dan pertanggungjawaban keuangan selalu dilaporkan kepada masyarakat atau lembaga yang terlibat. Dan juga semua dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan kegiatan sekolah.

Kata kunci: pembiayaan, pendanaan, pengelolaan pembiayaan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu tujuan bangsa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan mampu bersaing di dunia kerja. Pendidikan harus menjadi prioritas, untuk itulah diharapkan mutu pendidikan harus semakin berkualitas, baik itu diperkotaan maupun di pedesaan. Semua orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam berbagai tingkat kehidupan, pendidikan memiliki peran yang begitu sangat penting. Pendidikan banyak memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf atau mutu kehidupan seseorang. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat menghantarkan seseorang pada pencapaian tujuan yang diinginkan dan strata sosial yang lebih mapan.

Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan dalam pengertian yang luas berperan sangat penting dalam proses transformasi seseorang dan masyarakat. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa suatu usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan.

Semua pihak mengharapkan adanya pendidikan yang berkualitas atau bermutu, namun di sisi lain banyak pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Koswara dan Triana menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi aspek input, proses, output maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang baik. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industry.

Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas atau bermutu, diperlukan pembiayaan secara optimal. Selanjutnya dibutuhkan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama pihak yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan persoalan peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara professional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.¹

Pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah Negeri) dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta) yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Hal ini disebabkan karena segala kegiatan pendidikan tentu memerlukan dana atau biaya. Seperti yang dikatakan Anwar yang menyatakan bahwa “berperannya pendidikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pendidikan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang

¹ Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosda Karya

dikehendaki. Dalam proses kegiatan-kegiatan inilah muncul permasalahan mengenai biaya pendidikan”. Sedangkan Fattah menyatakan bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dengan kehati-hatiannya dalam perhitungan, terutama pada saat tahun ajaran baru.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu selalu dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Suatu hal yang mudah diterima bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Sistem penganggaran pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan di Indonesia, baik dari sisi prosedur perhitungan maupun mekanisme penyalurannya. Sedangkan terkait mutu pendidikan Dzaujak Ahmad mengemukakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.²

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan landasan hukum dan penegasan sikap pemerintah terhadap reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia, setelah sebelumnya diluncurkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam hidup masyarakat global. Penegasan kembali semangat reformasi bidang pendidikan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia (UU) No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP), serta beberapa kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan

² Dzaujak, Ahmad. 1996. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta. Depdikbud. 46

pemerintah tersebut, baik pada tingkat departemen sampai pemerintah daerah dan sekolah selaku pemegang otonomi pendidikan pada tingkat paling bawah.

Pernyataan diatas juga mengisyaratkan pentingnya pengembangan sekolah dasar dari yang konvensional kepada bentuk yang lebih profesional dan menjanjikan. Penyelenggaraan sekolah dasar secara profesional menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan dalam upaya mewujudkan lembaga pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Memperhatikan peranannya yang begitu besar itu sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara sosial-institusional maupun fungsional-akademik.

PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat disini yang dimaksud adalah: a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan c) pihak lain selain yang dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah pembiayaan merupakan masalah yang sangat mempengaruhi. Dan dapat dipastikan pula bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya yang memadai serta kerja sama seluruh pihak yang terkait

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas. Namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus tunggal yang difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan di SD Plus Al Hikmah Kediri yang dalam penelitian ini membahas sumber dana pendidikan yang didapat dan akuntabilitas sekolah. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya dalam dunia pendidikan, maka pendekatan

yang tepat digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini berupa penelitian tanpa menggunakan angka statistik tapi menggunakan pemaparan data secara deskriptif. Mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Sebagaimana pula yang disarankan oleh Marshal dan Rosman dalam Bafadal, dinyatakan bahwa suatu proses sebaiknya didekati dengan pendekatan kualitatif.

Agar data-data yang didapatkan cukup memadai, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa study documenter. Metode study documenter sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen atau dari buku yang berkaitan dengan focus penelitian ini yaitu tentang sumber dana dan akuntabilitas keuangan sekolah.

Disamping itu juga menggunakan metode interview atau wawancara. Wawancara dapat digunakan secara independen dalam suatu penelitian kualitatif ataupun dapat juga digunakan bersama-sama dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuisisioner dan sebagainya untuk menjangkau informasi yang lebih lengkap³. Kegiatan wawancara berupa kegiatan tanya jawab kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses manajemen pembiayaan. Dalam hal ini yaitu bendahara umum dan bendahara sekaligus operator dana BOS SD Plus Al Hikmah. Interview dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih tentang penerimaan dan pengolaan dana yang didapat sekolah.

Dalam kaitannya dalam pendidikan, adanya manajemen pembiayaan sangatlah penting. Melalui kegiatan manajemen pembiayaan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen keuangan ada beberapa manfaat yang didapatkan, yaitu; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dasar. 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah dasar.

³ Anggoro, M.Toha. 2018. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka, 6.20

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Real Objek Penelitian

SD Plus Al Hikmah merupakan lembaga pendidikan sekolah dasar swasta yang berlokasi di Jalan Raya Purwoasri No. 84 Purwoasri-Kediri, Jawa Timur. Sekolah ini merupakan sekolah yang berbasis pesantren karena berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Purwoasri Kediri. SD Plus Al Hikmah lahir dan berdiri sejak tahun 2008. Sekolah ini menyelenggarakan program belajar mengajar selama enam hari dalam seminggu. Sedangkan kurikulum yang digunakan merupakan kolaborasi antara kurikulum Diknas dan Depag.

Saat ini SD Plus Al Hikmah memiliki bangunan sekolah dengan tujuh lokal/kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru pengajar, ruang tata usaha, ruang seni, ruang multimedia, musholla, UKS, perpustakaan, laboratorium komputer dan MCK.

Sarana dan prasarana yang tersedia di SD Plus Al Hikmah bisa terbilang baik dan cukup lengkap untuk dimanfaatkan oleh para siswa. Mulai sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hingga kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan.

Sumber Dana Pendidikan

Pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks. Baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan system persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik adalah masalah pembiayaan atau keuangan.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun.

Sumber dana atau keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (E. Mulyasa, 2005)

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Pemerintah pusat maupun daerah mengusahakan agar alokasi untuk sector pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien dan mengusahakan adanya alokasi bagi sektor pendidikan yang diambil dari pajak umum.
2. Orang tua atau peserta didik. Menyadarkan orang tua agar mau dan tertib membayar SPP dan pendanaan lainnya yang diizinkan oleh pemerintah. Kemudian dana yang berasal dari orang tua peserta didik harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.
3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Mengajak masyarakat sebagai fasilitator peserta didik.

Bagi sebuah sekolah tentunya dibutuhkan suatu biaya atau dana untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sekolah sehari-hari. Tidak dapat dielakkan lagi peran penting dari adanya pembiayaan yang ada. Dan dari sini, untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah SD Plus Al Hikmah, menggunakan dana dari beberapa sumber. Antara lain dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), iuran SPP setiap bulan dari siswa, dan dari sumber dana lainnya termasuk sumbangan dari wali siswa dan pengajuan proposal.

Dalam permendiknas no. 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis BOS tahun 2011 disebutkan bahwa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Dari beberapa sumber dana yang diperoleh, perolehan yang paling besar adalah dana iuran SPP siswa yang dibayarkan setiap bulan sekali sebesar RP. 200.000,- per anak dengan perincian yang telah dituliskan oleh pihak sekolah. Sedangkan dana BOS diberikan oleh pemerintah dan diterima pihak sekolah

dalam periode tertentu. Sebelum tahun 2020 dana BOS yang diterima oleh SD Plus Al Hikmah sebanyak empat kali dalam setahun yaitu setiap akhir triwulan. Dan besarnya jumlah dana BOS yang diterima sekolah setiap tahun berbeda-beda.

Penggunaan dana BOS di SD Plus Al Hikmah disini didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara komite sekolah dan seluruh dewan guru termasuk didalamnya bendahara sekaligus operator dana BOS. Jadi setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya membuat RAPBS yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Untuk sumber dana lain-lain, berupa sumbangan dari wali siswa atau pengajuan proposal bersifat tidak tetap dan tidak mengikat. Orang tua siswa atau wali siswa SD Plus Al Hikmah sebagian besar dapat dikatakan memahami bahwa adanya pendidikan yang berkualitas termasuk tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab negara, hal ini nampak terlihat dari rutusnya wali siswa yang secara langsung datang untuk melunasi pembayaran spp setiap bulan dan pemberian sumbangan biaya pendidikan kepada pihak sekolah. Sedangkan pengajuan proposal hanya pada saat tertentu seperti kegiatan tahunan sekolah dan untuk pengajuan proposal sendiri biasanya ditujukan kepada organisasi atau lembaga yang termasuk badan usaha yang bekerja sama dengan SD Plus Al Hikmah. Sumber dana seperti ini bisa terbilang efektif untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan di sekolah.

Namun harus juga diperhatikan pengelolaan dana yang diterima. Penggunaan dana atau anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Sumber Dana SD Plus Al Hikmah Tahun 2018 s.d 2020

No	Tahun	Sumber Dana		
		Pemerintah	SPP	Lain-lain
1	2018	Rp. 57.600.000,-	Rp. 336.000.000,-	-
2	2019	Rp. 112.000.000,-	Rp. 302.400.000,-	-
3	2020	Rp. 33.200.000,-*	-	Rp. 23,855,000

*dana bos untuk tahap I

Tabel 2. Rincian dana Bantuan Pemerintah Tahun 2018 s.d 2020

No	Tahun	Bantuan Pemerintah (Dana BOS)				Total
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018		28.000.000,-	28.000.000,-	28.000.000,-	28.000.000,-	112.000.000
2019		19.200.000,-	38.400.000,-	Rp. 0,00	Rp. 0,00	57.600.000
2020		RP. 33.200.000,-	-	-	-	-

Pada tahun 2018 SD Plus Al Hikmah menerima sebanyak empat kali pencairan dana BOS dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 112.000.000,-. Sebagian besar dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan penggandaan buku belajar siswa ditahun tersebut untuk memenuhi kekurangan. Berbeda dengan dana BOS pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 pencairan dana BOS hanya sebanyak dua kali dalam setahun dengan jumlah keseluruhannya Rp. 57.600.000,-. Sedangkan pada tahun 2020 SD Plus Al Hikmah masih menerima satu kali pencairan dana BOS dengan jumlah Rp. 33.200.000,- pada akhir triwulan pertama.

Kemudian sebagaimana telah diketahui, fungsi dana BOS sesuai Permendikbud No.8 Tahun 2020 adalah guna menunjang kegiatan operasional sekolah. Seperti biaya untuk pengembangan perpustakaan sekolah, kegiatan penerimaan siswa baru, langganan daya dan jasa listrik, hingga pembayaran guru honorer. Namun pada 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan baru mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah guna memenuhi kebutuhan di masa pandemic COVID-19 yang terjadi.

Selanjutnya, untuk dana yang diperoleh dari iuran SPP siswa pada tahun 2018 didapat sebesar Rp. 336.000.000,- sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 304.000.000,-. Penggunaan dana dana yang ada, baik dana dari pemerintah maupun nonpemerintah sangat harus memperhatikan peraturan atau ketentuan yang telah berlaku.

Pelaksanaan Sekolah dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Langkah awal dalam proses manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menerapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa didalam perencanaan ada proses, ada kegiatan rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Sedangkan pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang maka dibuatlah perencanaan pembiayaan yang strategis.

Kentungan yang didapatkan dari diterapkannya perencanaan pembiayaan sekolah adalah sebagai pola dasar dalam memberikan gambaran tujuan yang diinginkan, kemudian program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas layanan sekolah. Dalam perencanaan pula terdapat sebuah anggaran yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana secara jujur dan hati-hati. Dalam anggaran pula tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga.⁴

Manajemen sekolah berusaha mengacu konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam mengelola sekolah. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, MBS didefinisikan sebagai “bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”. Sedangkan Tilaar berpendapat bahwa inti dari MBS adalah partisipasi masyarakat (dalam Irawan, 2004). Dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 pasal 49 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan disebutkan

⁴ Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Rosdakarya

bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Kemudian selain melibatkan para guru, manajemen sekolah juga melibatkan komite atau dewan sekolah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sebelum diajukan pada Dinas Pendidikan. Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit cost (satuan biaya) dan volume kegiatan.

Adapun salah satu tujuan dari MBS adalah adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Jadi kemungkinan besar jika perencanaan pembiayaan sekolah melibatkan seluruh komponen sekolah maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik, selain itu dengan melibatkan banyak aspek dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaan serta solidaritas.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, terkait dengan pengelolaan perencanaan penganggaran pembiayaan pada SD Plus Al Hikmah bahwa hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat dengan seluruh dewan guru serta staff sekolah dengan membahas suatu keperluan serta tujuannya dalam jangka waktu tertentu, misalnya jangka waktu pendek, sedang, dan panjang. Selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Termasuk di dalamnya membahas tentang gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah dalam periode tertentu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Seperti pengembangan dalam bidang sarana dan prasarana, pengembangan SDM guru, honor GTT, biaya perawatan sekolah, dan keperluan-keperluan lainnya terkait dengan proses belajar mengajar dikelas.

Pelaksanaan Sistem Laporan Sekolah

Segala hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berpengaruh baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah selalu tercatat rutin oleh seorang bendahara dalam suatu buku kas umum (BKU). Termasuk di dalamnya terdapat data tanda bukti pembiayaan yang dikeluarkan. Kemudian bendahara akan melakukan pembukuan. Setelah pembukuan akan disajikan sebuah laporan. Pihak penyelenggara pendidikan SD

Plus Al Hikmah, dalam hal ini kepala sekolah juga secara berjangka selalu menyusun laporan pertanggung jawaban yang berisi tentang laporan kegiatan dan laporan penggunaan keuangan secara utuh dan terperinci untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Perlu diperhatikan juga adanya pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, kemudian kesesuaian hasil yang dicapai baik dibidang teknis administrative maupun teknis operasional dengan peraturan yang telah ditetapkan dan pemanfaatan sarana yang ada baik manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi secara efisien dan efektif.

Lebih lanjut, Fatah (2000: 54) mengemukakan bahwa yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kegiatan pembiayaan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administrative. Dalam hal ini memerlukan analisa masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

Secara garis besar anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Menurut Nanang Fattah anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.

Dalam kaitannya dengan penggunaan atau pengeluaran dana di SD Plus Al Hikmah dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam pengeluaran, yaitu : pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran seperti penggandaan buku siswa dan sebagainya, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis educative, pengembangan ekstrakurikuler dan pendataan.

Kemudian dana untuk BOS yang diterima dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan serta melengkapi kebutuhan sekolah. Laporan penggunaannya juga diumumkan di dinding pengumuman sekolah sehingga dapat diketahui oleh siswa, guru, orang tua, komite sekolah serta masyarakat. Sedangkan dana lain yang dimiliki SD Plus Al Hikmah, seperti dana sumbangan dari wali siswa secara sukarela juga selalu tercatat dalam sebuah laporan terperinci begitu juga penggunaannya.

Sumber Sumber Dana Pembiayaan Sekolah

Biaya pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peran biaya tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.⁵ Biaya pendidikan pada tingkat sekolah diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat. Saat ini, sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari para siswa dan yayasan.⁶ Seperti yang dikemukakan pula oleh Nanang Fattah sekolah-sekolah umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lain.

Sumber dana sekolah adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan demi terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah baik dari pemerintah atau dari masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78 pasal 1) menjelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yakni; Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah.

Kemudian pada pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan pemerintah; bantuan pemerintah daerah;

⁵ Dedi, Supriadi, 2010. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 3

⁶ Ibid., 6.

bantuan pihak asing yang tidak mengikat; bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau sumber lain yang sah.

Dana dari masyarakat adalah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung. Dana tidak langsung seperti pajak dan retribusi. Di dalam dana masyarakat termasuk pula didalamnya dana pribadi atau dana rumah tangga.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya kepala sekolah membuat RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS kepala sekolah sebaiknya mengajak dan membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dengan melibatkan para guru ini akan diperoleh rencana yang tersusun dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Akuntabilitas Sekolah

Karena menyangkut masalah dana atau uang, bisa dibayangkan akan sangat rawan adanya penyelewengan, maka dari itu akuntabilitas sekolah sangat diperlukan agar tidak sampai terjadi hal seperti itu. Menurut Sony dkk., akuntabilitas adalah pertanggung jawaban public yang memiliki makna bahwasanya proses penganggaran dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.⁷ Sedangkan menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertical adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya kepada pemerintah pusat, dan pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban yang dilaksanakan kepada orang maupun lembaga yang sejajar.

Edi Sukarsono mengemukakan juga bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan

⁷ Sony Yuwono, dkk., 2005. *Penganggaran Sector Public: Pedoman Praktis Penyusunan , Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang. Media Publishing. 59

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki keterangan atau pertanggung jawaban.⁸

Maka dari itu pihak sekolah diwajibkan melaporkan seluruh pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak pemberi bantuan maupun kepada orangtua atau masyarakat yang telah menempatkan dan mempercayakan anak-anak mereka kepada lembaga pendidikan sekolah. Disamping itu adanya sebuah keterbukaan dalam penggunaan dana sangat diperlukan. Karena hal itu akan meminimalisir adanya kecurigaan penyelewengan penggunaan dana. Begitu pula sebaliknya, ketidakterbukaan dalam penggunaan dana maupun dalam proses pendidikan akan memicu kecurigaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Di lembaga pendidikan adanya transparansi berarti adanya keterbukaan sumber pembiayaan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggung jawaban yang jelas. Ada pula manfaat dari diterapkannya aspek transparansi dalam pengelolaan masalah keuangan yaitu, dapat efektif menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi.

Slamet (2005) menyatakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka diharuskan mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada public. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan public terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan public dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada public. Kemudian agar tujuan akuntabilitas dapat tercapai perlu adanya upaya nyata dari sekolah untuk mewujudkannya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Husaini Usman, melalui akuntabilitas pendidikan, masyarakat, pemerintah dan stakeholder memperoleh kepuasan karena dengan melaksanakan akuntabilitas pendidikan sekolah telah

⁸ Sukarsono, Edi. 2002. *Sistem Pendidikan Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. PT. Gramedia Pusaka Utama. 131

memberikan transparansi terkait apa saja yang akan dilakukan, telah dilakukan, maupun segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan sekolah.⁹

Di SD Plus Al Hikmah dalam hal ini sudah dapat dikatakan baik. Karena segala penerimaan dan pengeluaran dana selalu tercatat dan pengurusan serta penggunaannya juga selalu dilakukan secara transparan, baik pada laporan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS ataupun non pemerintah seperti sumbangan dari wali siswa atau pengajuan proposal. Tata kelola keuangan yang telah diterapkan juga terbilang cukup baik. Transparansi yang dilaksanakan juga terlihat. Dalam hal ini terdapat pada pemasangan laporan keuangan pada dinding sekolah sehingga memungkinkan untuk setiap orang bisa mengetahuinya. Mengikuti sertakan wali siswa dan masyarakat juga dilakukan agar mereka turut mengawasi penggunaan dana yang ada.

Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan agar lebih baik, kepala sekolah juga memperhatikan perlengkapan administrasi keuangan, tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi, mempunyai alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan. Pelaksanaan anggaran juga dikontrol oleh kepala sekolah. Hal ini dilaksanakan agar tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan perhatian yang khusus karena melalui pendidikan dapat menghasilkan keahlian dan ketrampilan, ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai yang dimiliki peserta didik.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan di SD Plus Al Hikmah sudah dapat dikatakan tergolong efektif dan cukup baik. Hal ini terlihat dari: *pertama*. Dalam masalah keuangan bisa dikatakan SD Plus Al Hikmah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber dana pendidikan. Dalam hal ini SD Plus Al Hikmah mendapatkan sebagian dana dari pembayaran iuran SPP siswa yang dibayarkan setiap bulan, serta dana BOS dari pemerintah. Penggunaan dana yang ada juga sudah dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Kedua, laporan penerimaan dan pengeluaran dana baik dana dari pemerintah maupun non pemerintah selalu tercatat oleh bendahara dalam buku kas umum (BKU) secara tertib dan terperinci. Kontribusi antara kepala sekolah

⁹ Husaini Usman, 2013. *Manajemen, Teori, Riset dan Praktek Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara. 543

dan bendahara menunjukkan kerjasama yang sangat baik sehingga beberapa program sekolah dapat terealisasi dengan cukup baik. Dan *ketiga*, system laporan pertanggung jawaban yang dilaksanakan SD Plus Al Hikmah sudah menunjukkan akuntabilitas sekolah. Transparansi atau keterbukaan sudah dilaksanakan yang dapat dilihat melalui penempatan laporan penggunaan keuangan pada dinding pengumuman sehingga bagi siapa saja bisa mengetahui informasinya. Serta mengikutsertakan wali siswa atau masyarakat untuk mengawasi laporan penggunaan dana agar dana yang diterima digunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosda Karya. 2000
- Nanang, Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung. Remaja Rosdakarya. 2009
- Dzaujak, Ahmad. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta. Depdikbud. . 1996
- Arifin, Zainal. *Tafsir Ayat Manajemen*. Yogyakarta. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. 2019
- Khaeruddin dan Mahfud dkk, 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasi di Sekolah*. Yogyakarta. Nuansa Aksara
- Bowen, Hobart R. *The Cost of Higher Education* London. Jossey-Bass Publisher.. 1998
- Widodo, Joko. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan.....* . Tesis. Bandung: PPS IKIP Bandung. . 1998
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta Ar-Ruzz Media Grup, 2010
- Dedi, Supriadi. *Satuan biaya pendidikan Dasar dan Menengah*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2010
- Hasbullah.. *Otonomi Pendidikan ; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006
- Anggoro, M.Toha. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka. 2018

Dedi, Supriadi,. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 2010

Sony Yuwono, dkk.,. *Penganggaran Sector Public: Pedoman Praktis Penyusunan , Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang. Media Publishing. 2005

Sukarsono, Edi. *Sistem Pendidikan Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. PT. Gramedia Pusaka Utama. . 2002

Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Riset dan Praktek Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2013.

Copyright © 2021 **Journal Salimiya**: Vol. 2, No. 2, Juni 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>